

Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Pendampingan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Dwi Indah Meilani¹, Bagoes Soenarjanto², Anggraeny Puspaningtyas³

^{1,2,3} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[¹dwiindahmeilani6@gmail.com](mailto:dwiindahmeilani6@gmail.com), [²bagoes87@untag-sby.ac.id](mailto:bagoes87@untag-sby.ac.id), [³anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

Abstract

The Family Hope Program (PKH) launched by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia can be said to be a community empowerment program because its goals are to help the economy of poor recipient families, the education system, and health. This research which focuses on the empowerment of KPM through PKH assistance and examines the supporting and inhibiting elements of KPM empowerment uses a qualitative research style with a descriptive method. Based on the research findings, PKH facilitators perform facilitation, mediation, and advocacy tasks for PKH KPM in gaining access to resources by empowering KPM through frequent group meetings and changing the perspective of KPM so that KPM can inspire them to do new things that are more valuable. It can be said that the empowerment of KPM through PKH mentoring has been successful, and the effective collaboration between PKH and KPM mentoring has helped empower KPM in Buduran Regency.

Keywords: KPM Empowerment, PKH Facilitator

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat karena sasarannya adalah membantu perekonomian keluarga penerima yang kurang mampu, sistem pendidikan, dan kesehatan. Penelitian yang berfokus pada pemberdayaan KPM melalui pendampingan PKH dan mengkaji unsur-unsur pendukung dan penghambat pemberdayaan KPM ini menggunakan gaya penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, fasilitator PKH melakukan tugas fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi PKH KPM dalam mendapatkan akses sumber daya dengan memberdayakan KPM melalui pertemuan kelompok yang sering dan mengubah cara pandang KPM sehingga KPM dapat menginspirasi mereka untuk melakukan hal-hal baru yang lebih berharga. Bisa dikatakan pemberdayaan KPM melalui pendampingan PKH telah berhasil, dan kerjasama yang efektif antara pendampingan PKH dan KPM telah membantu pemberdayaan KPM di Kabupaten Buduran.

Kata Kunci : Pemberdayaan KPM, Pendamping PKH

Pendahuluan

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang tingkat populasi penduduknya setiap tahun meningkat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, pada 2020 lalu jumlah penduduk Sidoarjo 2.033.764 jiwa. Hal ini menyebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri terjadi ketika masyarakat mulai keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Dalam kasus kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, seiring bertambahnya jumlah penduduk miskin, demikian pula pengeluaran per kapita. Ada 10,10 ribu orang lebih banyak pada Maret

2021 dibandingkan Maret 2020 (127,05 ribu vs 137,15 ribu). Pemerintah membuat kebijakan yang berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pemerintah daerah setempat melakukan berbagai upaya yang didukung oleh Kementerian Sosial RI salah satunya adalah pemberdayaan untuk masyarakat.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa upaya penegakan hak-hak masyarakat miskin harus dikoordinasikan, diarahkan, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat karena tujuannya difokuskan untuk membantu perekonomian keluarga miskin penerima, sistem pendidikan, dan kesehatan. Hanya satu dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar keluarga kurang mampu dapat memenuhi syarat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka termasuk ibu hamil, anak-anak antara usia 0 dan 6, anak-anak usia SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Orang tua dan orang cacat sama-sama ada

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak Keluarga Penerima yang menerima Bantuan dan Manfaat Sosial (KPM) PKH. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar hidup, mengurangi beban keuangan keluarga, mendukung keluarga menjadi mandiri, dan, tentu saja, memerangi kemiskinan.. Dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berupaya penuh menuntaskan persoalan kemiskinan tersebut dengan cara diturunkan langsung Pendamping PKH dalam pemantauan dan pendataan langsung masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial yaitu KPM.

Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 bisa mencapai 122 orang pembantu PKH, dengan penempatan yang berbeda-beda di setiap Kecamatan. Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH atau Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat (KPM PKH). Terdapat 39.804 KPM PKH per KK (Kartu Keluarga), dengan demografi yang beragam, antara lain anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas dengan berbagai derajat. Angka ini didapat dari informasi KPM terbaru tahun 2022 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dengan pengurangan KPM 39.804 dari setiap kecamatan, antara lain (Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Prambon, Porong, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, Wonoayu). Bantuan dari PKH adalah bantuan berupa uang tunai yang setiap 1 bulan sekali dapat diambil di ATM BNI terdekat. KPM didorong melalui PKH untuk terus mengakses dan menggunakan layanan sosial mendasar di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap. Program ini dirancang oleh birokrasi di mana organisasi publik dikembangkan seolah-olah mereka memiliki program yang menyenangkan masyarakat melalui penggunaan sub-program kecil yang dijuluki "kemenangan cepat".

Menurut penelitian Evi Rahmawati, Universitas Negeri Semarang dengan judul “ Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan “ Vol 1 (2) : 161-169, Desember 2017 bahwa Pendamping PKH berperan sebagai mitra masyarakat dan pemerintah, sehingga diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah. Tugas fasilitator PKH di Kabupaten Semarang Tengah telah berhasil diselesaikan. Pekerjaan ini dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok: keterampilan teknis, peran fasilitator, peran pendidik, dan posisi perwakilan masyarakat. Kesulitan peserta dalam menyusun file data dan pemutakhiran formulir merupakan unsur internal yang menjadi kendala dalam pendampingan. Informasi yang mendadak, jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi pendampingan ke pendamping, dan akses jalan yang menantang merupakan contoh elemen eksternal yang dapat menjadi penghambat.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Buduran. Banjarkemanten, Banjarsari, Buduran, Damarsi, Entalsewu, Pagerwojo, Prasung,

Sawohan, Sidokepung, Sidokerto, Sidomulyo, Siwalanpanji, Sukorejo, dan Wadungasih termasuk di antara 15 desa yang membentuk Kecamatan Buduran. Kabupaten Buduran terdapat 1.281 KPM PKH. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Buduran adalah nelayan tambak dan mengelola tempat wisata serta sebagai buruh pabrik. Dengan tingkat populasi penduduk dan mayoritas pekerjaan KPM PKH disana berhak mendapatkan bantuan PKH. Tujuan PKH adalah untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional untuk menjadikannya sebagai pusat dan pusat unggulan nasional untuk mengurangi kemiskinan.

Dari uraian permasalahan diatas, maka peneliti merasa untuk menganalisis yang diterapkan pendamping PKH dengan “Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Istilah "penelitian naturalistik" mengacu pada fakta bahwa subjek penelitian kualitatif biasanya adalah benda-benda alam atau lingkungan alam.

1. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- Observasi
Observasi langsung terhadap item digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keberadaan objek, keadaan, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data.
- Wawancara Mendalam (*Indepth Interviews*)
Dalam penelitian ini, informan yang akan di wawancarai adalah KPM penerima dan pendamping PKH di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Teknik Analisa Data

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan M.B Miles A.M Huberman dan J. Saldan (2014:8-10) mengungkapkan bahwa terdapat empat jenis jenis bentuk analisis sebagai berikut :

- Pengumpulan Data (*Data Collecting*)
Peneliti mendapatkan data melalui wawancara kepada Informan yang Pertama, Koordinasi PKH Kabupaten Sidoarjo. Kedua, pendamping PKH kecamatan Buduran. Ketiga, KPM di Kecamatan Buduran.
- Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
Informasi yang dikumpulkan akan dibagi ke dalam kategori seperti sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Peneliti juga dapat menyimpan informasi yang mereka butuhkan dan membuang informasi yang tidak mereka butuhkan.
- Penyajian Data (*Data Display*)
Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi dari berbagai informan Pendamping PKH dan KPM di Kecamatan Buduran dengan bentuk yang tersusun sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Buduran.
- Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*) atau verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu.

Hasil Dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh pendamping PKH kecamatan Buduran dan diawasi oleh PKH Kabupaten Sidoarjo. Dari adanya Pemberdayaan masyarakat menghasilkan konsep pembangunan kualitas manusia (salim,1990:20) kapasitas ini mencakup 5 aspek yaitu kapasitas untuk memproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat,

keberlanjutan (*sustainable*) dan kesadaran akan interdependensi antara manusia, lingkungan dan antar Negara. Bila didefinisikan seperti ini, pembangunan kualitas pada dasarnya adalah upaya untuk pengembangan inisiatif dan kreativitas sebagai sumber daya pembangunan yang utama dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Pendamping PKH kecamatan Buduran melakukan pemberdayaan masyarakat dengan dilakukannya pertemuan rutin KPM setiap 1bulan sekali tujuannya adalah agar dapat merubah pola pikir KPM agar lebih maju dan tidak tertinggal. Merubah pola pikir masyarakat tidak gampang, dikarenakan latar belakang pendidikan dan budaya dari setiap KPM yang berbeda.

Dengan merubah pola pikir KPM sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah Ketika datang untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan terutama berkaitan dengan membawa generasi baru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.. Pendamping PKH memberikan wawasan mengenai pendidikan yang dimana pendidikan adalah yang paling utama untuk anak. Dikarenakan banyak dari KPM yang berfikir jika pendidikan tidak perlu tinggi-tinggi. Contoh, di Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo banyak ditemukan anak usia dini sudah menikah dan mempunyai anak.

2. Tatacara dan Pengelolaan Keuangan

Pendamping PKH memberikan wawasan mengenai tatacara pengelolaan keuangan, karena mengelola keuangan adalah hal yang penting untuk menghindari masalah ekonomi yang terjadi kepada KPM. Pendamping PKH Kecamatan Buduran memberikan pengetahuan agar dapat menambah keuangan KPM dengan cara KPM diberi pengetahuan dan cara pembuatan kerajinan atau makanan ringan dan diberikan modal awal agar dapat dipakai oleh KPM yang nantinya dari hasil pembuatan kerajinan dan makanan ringan dapat diperjualbelikan.

3. Kesehatan dan Gizi

Pentingnya memenuhi semua kebutuhan anak usia dini, termasuk yang terkait dengan kesehatan, gizi, dan perawatan, pendidikan, dan kesejahteraan dan perlindungan, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Fasilitator PKH di Kecamatan Buduran melakukan strategi sosialisasi ke dusun-dusun terpencil untuk mengajari mereka kebiasaan sehari-hari yang sehat termasuk memotong kuku setiap minggu, menyikat gigi setiap hari, mencuci tangan setiap hari, dan mengajari anak-anak cara merawat diri di kamar mandi. Stunting pada anak dihindari melalui sosialisasi nilai menjaga kesehatan dan gizi oleh Fasilitator PKH di Kecamatan Buduran.

4. Kesejahteraan Sosial (Disabilitas)

Salah satu penyebab utama gangguan adalah gizi yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman keluarga tentang masalah kesehatan dan kebutuhan diet balita. Pendamping PKH di Kecamatan Buduran dengan demikian menawarkan pemberdayaan keluarga pada standar pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif jika dilihat dari kesulitan yang terjadi. Bukannhanya itu saja, pendamping PKH kecamatan Buduran juga memberikan pengetahuan kepada KPM tentang tidak membedakan anak dan setiap anak harus diperlakukan sama agar tidak terjadinya kecemburuan sosial.

Penutup

1. Kesimpulan

Pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui pendampingan program keluarga harapan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dikatakan baik, dikarenakan adanya respon yang baik dari KPM tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pada prakteknya, pendamping

PKH Kecamatan Buduran sudah melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kepada KPM PKH. Beragam kendala yang berasal dari kurangnya anggaran yang diberikan oleh pusat untuk membeli keperluan berupa alat pendukung sosialisasi (modul sosialisasi dan *flipcard*) tidak menjadi kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Buduran.

2. Saran

Proses pemberdayaan KPM melalui Pendamping PKH, alangkah baiknya jika antara Kementerian Sosial RI, Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Sidoarjo dan Pendamping Kecamatan Buduran dapat bekerjasama dalam pemantauan dan pembaruan data setiap 1 bulan sekali. Diharapkan juga anggaran dari pusat dapat tepat waktu dan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan KPM agar proses pemberdayaan KPM dapat berjalan dengan optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial KPM PKH di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- (Effendi, 2007) Effendi, S. (2007). Perspektif Administrasi Pembangunan Kualitas Manusia. *Makalah Seminar Nasional HIPIIS*.
- Kementrian Sosial. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Program Keluarga Harapan*.
- Munandar, H., Arifin, H. M. Z., & Zulfiani, D. (2019). *Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program*. 7(4), 9452–9465.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10.